

***GOOD GOVERNANCE* PEMERINTAH KOTA: APAKAH DIPENGARUHI BUDAYA ORGANISASI, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI, DENGAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(PADA OPD KOTA TEGAL)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Tuti Anawiyah**

**NPM: 4320600122**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**



***GOOD GOVERNANCE* PEMERINTAH KOTA: APAKAH DIPENGARUHI BUDAYA ORGANISASI, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI, DENGAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(PADA OPD KOTA TEGAL)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Tuti Anawiyah**

**NPM: 4320600122**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**

#



# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO**

“Mereka atau kita, semua sama.
Menanti sebuah keadaan hidup yang akan datang setelah doa dan usaha”

(Zhafir K Akalanka)

**PERSEMBAHAN**

 Selesainya karya ini dibuat dengan segala ketidaksempurnaannya, maka penulis persembahkan:

“Kepada mereka,
yang terbentuk dari serangkai cinta dan doa yang mengangkasa;

*Bapak, Ibu, dan Adik*

yang berjuang bersama dan terlibat dalam penyusunan karya;

*Sahabat, teman, dan orang baik lainnya*

yang menyertai kekosongan;

*Lima bintang yang sedang bersinar di dunianya,*

*terutama Tuan beruang manis yang di sana.*

dan teruntuk yang teristimewa;

*aku, kamu, dan mereka yang bertahan.*”



# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh antara budaya organisasi dan *good governance*; 2) pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan dan *good governance*; 3) pengaruh antara teknologi informasi dan good governance; 4) pengaruh kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam memoderasi hubungan antara budaya organisasi dan *good governance*; 5) pengaruh kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah dan *good governance*; 6) pengaruh kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam memoderasi hubungan antara teknologi informasi dan *good governance*. Penelitian ini merupakan peelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal dengan penentuan sampel menggunakan sampling jenuh sehingga diperoleh 70 responden. Data yang digunakan yaitu data primer berupa kuesioner. Analisis yang digunakan yaitu regresi berganda dengan program SPSS 22.0

Hasil penelitian membuktikan bahwa budaya organisasi dan standar akuntansi pemerintahan memengaruhi *good governance*. Namun, teknologi informasi tidak memengaruhi secara signifikan terhadap *good governance*. Selain itu, kinerja aparatur pemerintahan daerah memperlemah hubungan antara budaya organisasi dan *good governance,* memperkuat standar akuntansi pemerintah dengan *good governance*, tetapi tidak mampu memoderasi hubungan antara teknologi informasi dan *good governance*.

**Kata kunci: *Good Governance,* Budaya Organisasi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah**

# ABSTRACT

*This study aims to test 1) the impact between organizational culture and good governance; 2) the influence between government accounting standards and good governance; 3) the impact among information technology and good governance; 4) the impact of the performance of the regional government aparaturs in moderating the relationship between culture of the organization and good government; 5) the impact on the performance of the local government apparaturs in moderating the relationships between the standard of government accountancy and good governance; 6) the effect of the functioning of the provincial government apparats in moderation of the relation between information technologies and good governance. This research is quantitative. The population in thi study is teh Regional Organizational of teh City Tegal. Samples were determined using saturated sampling and 70 respondents were obtained. The data used is primary dat ain the form of questionnaire. The analsis used is a double regression with SPSS program 22.0*

*The research results prove that organizational culture and government accounting standards influence good governance. However, information technology does not significantly influence good governance. In addition, the performance of regional government officials weakens the relationship between organizational culture and good governance , strengthens government accounting standards and good governance, but is unable to moderate the relationship between information technology and good governance.*

***Keywords: Good Governance, Organizational Culture, Government Accounting Standars, Information Technologi, and Regional Government Appliances Performance***

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul “*Good Governance* Pemerintah Kota: Apakah Dipengaruhi Budaya Organisasi, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Teknologi Informasi, dengan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah sebagai Variabel Moderasi (Pada OPD Kota Tegal).”

Skripsi ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak ada yang berharga dan bernilai yang dapat penulis tawarkan selain rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Ak, C.A. selaku Dekan Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Abdullah Mubarok, S.E, M.M, Ak, C.A. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Dewi Indriasih, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan saran dan motivasi kepada peneliti
4. Bapak Budi Susetyo, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran dan motivasi kepada peneliti
5. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang sudah membantu dalam pengkajian dan penyusunan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Pancasakti Tegal yang sudah memberikan bekal dalam kegiatam belajar mengajar
7. Bapak, Ibu, Adik, Keluarga, dan Sahabat yang selalu memberikan do’a dan semangat
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penyusunan skripsi nantinya.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

|  |
| --- |
| Tegal, Juli 2024 |
| Tuti Anawiyah |

# DAFTAR ISI

**Halaman**

SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Landasan Teori 8

1. *Stewardship Theory* 8

2. *Good Governance* 9

3. Budaya Organisasi 12

4. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) 15

5. Teknologi Informasi 18

6. Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah 21

B. Penelitian Terdahulu 23

C. Kerangka Pemikiran Konseptual 30

D. Hipotesis 36

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Jenis Penelitian 37

B. Populasi dan Sampel 37

C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 39

D. Metode Pengumpulan Data 43

E. Instrumen Penelitian 43

F. Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50

A. Gambaran Umum 50

B. Hasil Penelitian 58

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN 94

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Indeks WGI Indonesia Tahun 2020-2022 2

Tabel 1.2 Rekapitulasi Perkembangan Opini LKPD Tahun 2017-2022 3

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 28

Tabel 3.1 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal 37

Tabel 3.2 Operasional Variabel 41

Tabel 3.3 Skala Interval 43

 Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner 51

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden 52

Tabel 4.3 Pendidikan Responden 52

Tabel 4.4 Lama Bekerja 53

Tabel 4. 5 Bidang Keahlian Responden 53

Tabel 4.6 Deskripsi Item Pernyataan Budaya Organisasi (X1) 54

Tabel 4.7 Deskripsi Item Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) 55

Tabel 4.8 Deskripsi Item Pernyataan Teknologi Informasi (X3) 56

Tabel 4.9 Deskripsi Item Pernyataan Kinerja Aparatur Pemda (Z) 57

Tabel 4.10 Deskripsi Item Pernyataan *Good Governance* (Y) 57

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik Deskriptif 58

Tabel 4.12 Validitas Instrumen per Item *Good Governance* (Y) 60

Tabel 4.13 Validitas Instrumen per Item Budaya Organisasi ($X1$) 61

Tabel 4.14 Validitas Instrumen per Item SAP ($X2$) 61

Tabel 4.15 Validitas Instrumen per Item Teknologi Informasi ($X3$) 62

Tabel 4.16 Validitas Instrumen per Item Kinerja Aparatur Pemda (Z) 62

Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabilitas 63

Tabel 4.18 Hasil Analisis Uji Normalitas 63

Tabel 4.19 Hasil Analisis Uji Multikolinieritas 64

Tabel 4.20 Hasil Uji Heteroskedastisitas 64

Tabel 4.21 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 65

Tabel 4.22 Hasil Uji *Moderate Regresion Analysis* 66

Tabel 4.23 Hasil Hipotesis Uji F Model Regresi 1 68

Tabel 4.24 Hasil Uji F Model Moderasi 68

Tabel 4.25 Hasil Uji T Model Regresi 1 69

Tabel 4.26 Hasil Uji T Model Moderasi 70

Tabel 4.27 Hasil Uji Koefisien Deerminasi Model 1 73

Tabel 4.28 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Moderasi 73

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 36

#  DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat Penelitian Skripsi 95

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 100

Lampiran 3. Tabulasi Data 106

Lampiran 4. Deskripsi Tanggapan Responden 116

Lampiran 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif 123

Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Data 123

Lampiran 7. Hasil Uji Reliabilitas Data 128

Lampiran 8. Hasil Uji Asumsi Klasik 128

Lampiran 9. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 129

Lampiran 10. Tanda Bukti Pengambilan Kuesioner 130

Lampiran 11. Dokumentasi Pengisian Data Kuesioner 134

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

 *Good governance* berperan penting sebagai praktik pengelolaan yang efektif untuk menangani berbagai aspek penyelenggaraan negara di tingkat administratif, politik, dan ekonomi. G*ood governance* muncul karena adanya peristiwa secara besar-besaran antara pemerintah dan masyarakat pada era reformasi yang mengakibatkan perubahan atau konsep hubungan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun politik tata kelola kelembagaan. Permasalahan yang muncul seperti monopoli dalam kegiatan ekonomi, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), lemahnya penegakkan hukum, serta buruknya kualitas pelayanan publik memunculkan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga terjadi pergeseran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah memengaruhi perubahan paradigma pelaporan serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah (OPD) yang dituntut harus transparansi untuk masyarakat, sehingga tercipta akuntabilitas publik dan selaras dengan tujuan *good governance* (Moenek & Suwanda, 2019:1; Syafrion, 2015).

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kaufmann & Kraay (2023) dalam publikasi *The Worldwide Governance Indicators*/WGI mengungkapkan pada tahun 2020-2022, nilai estimasi indeks *good governance* Indonesia masih di bawah nilai ketentuan yaitu 2,5 yang berarti kinerja dalam indikator *good governance* dinilai sangat buruk, sedangkan estimasi nilai 2,5 menunjukkan bahwa kinerja dalam indikator *good governance* dinilai sangat baik (Apaza, 2009).

Tabel 1.1
Indeks WGI Indonesia Tahun 2020-2022

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikator *good governance*** | **Indeks** |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| Akuntabilitas | 0,10 | 0,15 | 0,14 |
| Stabilitas Politik dan Terorisme | -0,46 | -0,55 | -0,44 |
| Efektivitas Pemerintah | 0,32 | 0,35 | 0,44 |
| Kualitas Aturan | 0,22 | 0,29 | 0,21 |
| Prinsip Hukum | -0,36 | -0,25 | -0,19 |
| KKN | -0,45 | 0,45 | -0,43 |

 Sumber: *Wordwide Governance Indicators* ([www.govindicators.org](https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators))

 Mulyadi menjelaskan bahwa pemerintahan dikatakan memiliki nilai-nilai baik atau *good governance* jika sudah dinyatakan sebagai pemerintahan wajar tanpa pengecualian dalam opini auditnya (Wibowo & Indeswari, 2019). Berdasarkan pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa opini WTP meningkat dari 82% menjadi 91% pada tahun 2018-2022. Di antara semua pemerintahan daerah, ada 15 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengalami kenaikan dari tahun 2021, sementara 2 Provinsi (Pemprov), 13 Kabupaten (Pemkab), dan 4 Kota (Pemkot) mengalami penurunan. Capaian opini Pemprov dan Pemkab telah melebihi target kinerja kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas sebesar masing-masing 93% dan 82% di tahun 2022, namun capaian opini pemkot tidak mencapai target yaitu sebesar 93% (IHPS BPK RI, 2023; Bayu, 2023).

 Berdasarkan penyampaian LHP LKPD (Laporan Hasil Pemeriksaan Laoran Keuangan PemerintahDaerah, salah satu dari beberapa pemerintahan Se-Karasiden Pekalongan yaitu Pemerintah Kota Tegal mengalami peningkatan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Perkembangan Opini LKPD Karasiden Pekalongan
Tahun 2017-2022

|  |  |
| --- | --- |
| **Karasiden****Pekalongan** | **OPINI** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Kab Batang | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Brebes | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Pekalongan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Pemalang | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP |
| Kab Tegal | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kota Pekalongan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kota Tegal | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

 Sumber: IHPS BPK RI

 Meskipun mengalami peningkatan, BPK mendeteksi adanya pengendalian intern yang masih lemah serta ketidaktaatan dengan peraturan perundang-undangan, seperti pemborosan pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi, kelebihan pembayaran honor tim pelaksana kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dan kelebihan pembayaran pekerjaan belanja modal infrastruktur pada empat OPD (LHP BPK, 2022).

 Beberapa fenomena tersebut terjadi karena minimnya kompetensi aparat pemerintah daerah, kurangnya pengawasan, serta tidak adanya transparansi daerah, sehingga menyebabkan penerapan *good governance* belum terlaksana secara maksimal (Ihsanuddin dkk., 2018). Menurut Restra (Rencana Startegis), terdapat masalah strategis mengenai tugas dan fungsi Bakeuda Kota Tegal, seperti belum maksimalnya pengendalian, pelaksanaan tugas dan fungsi keuangan dan hukum, serta pelaporan dalam melaksanaan program secara tertib, transparan, juga akuntabel; serta belum efektif, efisien, juga tertib administrasi dalam mengelola aset daerah (Bakeuda, 2023).

 Budaya organisasi dianggap sebagai variabel rintangan yang dapat memengaruhi *good governance*. Diharapkan budaya organisasi dapat mendorong aparatur untuk melayani publik dengan baik. Fenomena yang terjadi di Indonesia terjadi karena pemerintah kurang memperhatikan perubahan budaya organisasi, sehingga menyebabkan reformasi administrasi kurang berhasil (Sari, 2012; Mardiasmo dkk., 2008).

 Keberhasilan *good governance* dipengaruhi olehStandar Akuntansi Pemerintahan yang dapat dinilai dari kesesuaian penyusunan dengan SAP juga peraturan lain yang masih berlaku. Namun yang terjadi di beberapa kelembagaan, laporan keuangan dinilai masih kurang transparan dan data yang disajikan belum sesuai dengan peraturan (Wibowo & Indeswari, 2019).

 Teknologi informasi adalah faktor lain yang memengaruhi *good governance*. Teknologi informasi diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan prinsip *good government governance,* seperti transparansi, patisipasi masyarakat, efektivitas serta efisiensi, responsibilitas, maupun akuntabilitas (Ikhbaluddin, 2020).

 Faktor lainnya yang memengaruhi *good governance* yaitu kinerja aparatur pemerintahan daerah. Salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia yaitu terbatasnya aparatur pemerintah yang berkualitas, dibuktikan dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah selama ini (Enceng dkk., 2008).

 Penelitian terkait variabel dependen *good governance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang menghasilkan pendapat atau hasil yang beragam. Sebagai contoh penelitian Erayanti dkk. (2023) menyimpulkan bahwa baik variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maupun budaya organisasi memiliki pengaruh positif dengan *good governance*, sedangkan penelitian Wibowo & Indeswari (2019), budaya organisasi tidak memengaruhi *good governance* dan penelitian Alfarisi dkk. (2020) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan juga tidak memengaruhi *good governance.*

 Penelitian Fanitra & Junaidi (2020) menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi memiliki pengaruh positif dengan implementasi *good government governance* (GGG), sedangkan penelitian oleh Edinov dkk. (2022) menyimpulkan bahwa variabel teknologi informasi serta budaya organisasi berpengaruh secara negatif dengan *good governance*. Hasil Penelitian Wibowo & Indeswari. (2019) dan Lestariningrum dkk. (2020) menghasilkan variabel kinerja aparatur pemerintah daerah yang memengaruhi secara positif dengan *good government governance*, sementara penelitian Haura dkk. (2019) menyimpulkan variabel kinerja aparatur pemerintah daerah tidak memengaruhi secara signifikan dengan *good governance*.

 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, jelas bahwa terdapat perbandingan hasil penelitian yang berbeda atau tidak konsisten pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“*Good Governance* Pemerintah Kota: Apakah Dipengaruhi Budaya Organisasi, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Teknologi Informasi dengan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah sebagai Variabel Moderasi (Pada OPD Kota Tegal)”**. Adapun alasan pemilihan OPD di Kota Tegal karena memiliki keunggulan adanya pembangunan yang dapat mendorong atau menjadi penggerak bagi sektor atau instansi lainnya.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang sebelumya, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah Budaya Organisasi memengaruhi *Good Governance*?
2. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah memengaruhi *Good Governance*?
3. Apakah Teknologi Informasi memengaruhi *Good Governance*?
4. Apakah Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah memperkuat hubungan antara Budaya Organisasi dan *Good Governance*?
5. Apakah Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah memperkuat hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintah dan *Good Governance*?
6. Apakah Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah memperkuat hubungan antara Teknologi Informasi dan *Good Governance*?

## Tujuan Penelitian

 Menurut rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui keberpengaruhan antara Budaya Organisasi dan *Good Governance.*
2. Mengetahui keberpengaruhan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance.*
3. Mengetahui keberpengaruhan antara Teknologi Informasi dan *Good Governance*.
4. Mengetahui keberpengaruhan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah sebagai moderasi dengan Budaya Organisasi dan *Good Governance*.
5. Mengetahui keberpengaruhan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah sebagai moderasi dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan *Good Governance*.
6. Mengetahui keberpengaruhan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah sebagai moderasi dengan Teknologi Informasi dan *Good Governance*.

## Manfaat Penelitian

 Studi ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kotribusi bagi penulis, pembaca maupun peneliti lainnya, diantaranya:

1. **Manfaat Teoritis**

 Baik untuk penulis, mahasiswa, maupun peneliti lain, studi ni diharapkan mampu menambah wawasan, sebagai tambahan literatur, dan menjadi sarana perluasan ilmu pengetahuan mengenai Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah yang memoderasi pengaruh Budaya Organisasi, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Teknologi Informasi terhadap *Good Governance.*

1. **Manfaat Praktis**

 Studi ini diharapkan dapat memberikan saran atau rekomendasi bagi pemerintah atau instansi agar penerapan *good governance* dapat terlaksana dan otonomi daerah dapat terwujud.

# TINJAUAN PUSTAKA

## Landasan Teori

### *Stewardship Theory*

 Davis dkk. (1997:24) mendefinisikan s*tewardship theory* sebagai teori yang memiliki dasar psikologi dan sosiologi, dimana manajer sebagai *steward* bertindak bukan karena tujuan pribadi tetapi demi kepentingan organisasi dengan berusaha mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Dalam *stewardship theory,* “*model of man*” didasarkan pada seorang *steward* yang berperilaku agar selalu dapat bekerja sama, memiliki perilaku berkelompok atau kolektif, dan selalu bersedia membantu. Ahli *stewardship theory* beranggapan ada keterkaitan yang kuat antara keberhasilan dengan kepuasan organisasi. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, seorang *steward* berusaha melindungi serta memaksimalkan pemegang saham (*shareholder)* melalui kinerja, di mana jika *shareholder* dilayani dengan baik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan organisasi (Yuniarti dkk., 2021).

Deckop dkk (dalam Kuppelwieser, 2011) menjelaskan bahwa *stewardship theory* menempatkan keselarasan yang erat antara nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai manajer. Kepercayaan dan motivasi intrinsik membentuk landasan bagi lingkungan dalam organisasi yang digerakkan oleh *stewardship*. Seringkali *steward* bertindak secara altruistik demi kebaikan organisasi, sehingga mereka mengidentifikasi diri dengan organisasi dan berkomitmen bahkan sampai melakukan pengorbanan pribadi. Akan tetapi, jika suatu imbalan (*reward*) tidak dirasakan oleh *steward*, maka motivasi intrinsik juga akan menurun.

 Demi tercapainya tujuan, pemerintah akan berusaha menjalankan pemerintahannya dengan maksimal, sehingga rakyat di mana sebagai pemilik akan merasa puas dan senang terhadap kinerja pemerintah (Putro, 2013). Dalam mengelola anggaran daerah, pemerintah daerah yang bertindak sebagai *steward* menggunakan pendekatan *governance* seperti melakukan pengelolaan yang baik secara kolektif dan kooperatif untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Agar mencapai tujuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara optimal, pemerintah daerah harus berfungsi sebagai lembaga instansi yang dipercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melayani publik dengan baik, dan menjunjung tinggi standar yang telah ditetapkan untuk akuntabilitas keuangan (Dilliana & Herdi, 2022).

### *Good Governance*

1. **Definisi *Good Governance***

 *Good governance* menurut Thomas (dalam Tomo, 2019:15) merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi terutama di tengah-tengah kompetisi ekonomi global yang semakin kuat. Menurut Suhardiman dkk. (2023), *good governance* adalah proses yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, pemerataan, kesetaraan, dan efisiensi, serta melibatkan para pemangku

kepentingan (*stakeholders)* dalam beragam kegiatan serta pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan rakyat. *Good governance* yang diartikan menurut Zeyn (2011) yaitu pemerintahan yang dipertanggungjawabkan (*accountable*) kepada masyarakat, pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta sistem pengendalian yang mampu diandalkan.

Definisi *good governance* menurut *World Bank* yang dikutip oleh Erayanti dkk. (2023) merupakan sistem manajemen pembangunan yang efekif dan akuntabel yang menganut nilai demokrasi dengan cara mencegah terjadinya korupsi serta penyalahgunaan dana investasi, menegakkan disiplin anggaran, serta menetapkan *political framework* yang dibutuhkan untuk pertumbuhan aktivitas atau kegiatan usaha. Sedangkan UNDP (*United National Development Program)* memberi pengertian *good governance* yaitu penyelenggaraan urusan negara melalui pelaksanaan kekuasaan di semua tingkatan baik di bidang ekonomi, politik, maupun administratif.

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka disimpulkan *good governance* sebagai tata kelola pemerintahan pada kegiatan politik, ekonomi, , administratif, serta pemanfaatan sumber daya dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas. Menciptakan kerangka hukum dan politik untuk aktivitas usaha, serta manejemen pembangunan yang kompeten dan akuntabel merupakan komponen lain dari *good governance* (Erayanti dkk., 2023; Suhardiman dkk., 2023; Tomo, 2019; Zeyn, 2011).

1. **Tujuan dan Manfaat *Good Governance***

 Tujuan dari *good governance* menurut Mardiasmo (dalam Moenek & Suwanda, 2019:52) yaitu meningkatkan kesejahteraan mayarakat dengan mendorong pembangunan negara yang kuat, masyarakat sipil yang mandiri, serta pasar yang dinamis. Selain itu, manfaat diterapkannya *good governance* yaitu:

1. Praktik KKN di lingkungan pemerintahan dapat berkurang.
2. Terbentuknya kerangka kerja pada kelembagaan serta manajemen pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, serta efektif.
3. Kebijakan, aturan, serta praktik yang mendiskriminasi anggota kelompok atau golongan tertentu dapat terhapus.
4. Memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan konsistensi dan memiliki kepastian hukum.
5. **Prinsip-Prinsip *Good Governance***

 Prinsip-prinsip penyelenggaraan *good governance* menurut UNDP yang dikutip oleh Haura dkk. (2019) meliputi:

1. Partisipasi. Bbaik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan yang diwakilkan oleh lembaga atau instansi yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Aturan Hukum. Seperangkat hukum yang diterapkan, ditegakkan, dan dipatuhi secara adil tanpa membeda-bedakan.
3. Transparansi. Kebebasan dalam mengakses informasi secara langsung untuk kepentingan publik.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*). Dalam melayani *stakeholder* atau pemangku kepentingan, lembaga-lembaga publik harus bertindak tanggap dan cepat.
5. Berorientasi Konsensus. Berorientasi pada kepentingan publik dan masyarakat umum.
6. Berkeadilan. Setiap warga/masyarakat memiliki kesempatan sama dalam mendapatkan keadilan serta kesejahteraan.
7. Efektif dan Efisiensi. Sumber daya publik yang dikelola, dilakukan secara efisien/berdaya guna serta efektif/berhasil guna.
8. Akuntabilitas. Setiap tindakan atau kegiatan yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
9. Bervisi Strategis. Baik penyelenggara pemerintahan mzupun masyarakat harus mempunyai tujuan jangka panjang dan jelas.

### Budaya Organisasi

1. **Definisi Budaya Organisasi**

 Pengertian budaya organisasi menurut Schen (dalam Tran, 2021) yaitu kumpulan kebiasaan, kepercayaan, dan norma yang membentuk sikap, tindakan, dan perilaku dalam organisasi. Maria dkk. (2022:2) mendefinisikan budaya organisasi sebagai cara berpikir yang memandang kehidupan sebagai serangkaian nilai-nilai yang membentuk karakter serta mendorong perilaku kelompok atau organisasi.

 Greenberg dan Baron (dalam Azizah, 2018) mendefinisikan budaya organisasi sebagai kerangka berpikir yang mencakup nilai, norma, sikap, serta harapan yang diterima bersama atau kolektif oleh anggota organisasi. Bemidele (2022) berpendapat mengenai budaya organisasi yaitu kerangka asumsi, nilai, serta keyakinan umum yang dimiliki untuk menentukan bagaimana organisasi memperlakukan individu. Sawlani dkk. (2021:63) menyimpulkan budaya organisasi sebagai prinsip-prinsip yang dimiliki anggota organisasi yang dapat memberikan stabilitas kepada organisasi, tetapi juga dapat menjadi menghalangi perubahan.

 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka disimpulkan bahwa budaya organisasi dipandang sebagai suatu perspektif berdasarkan norma, keyakinan, serta nilai kolrktif yang dapat memengaruhi perilaku karyawan, bagaimana cara menggambarkan pekerjaan dan bekerja dengan rekan kerja lainnya (Azizah, 2018; Bemidele, 2022; Maria dkk., 2022; Rivai & Mulyadi, 2012; Sawlani dkk., 2021).

1. **Fungsi Budaya Organisasi**

 Tindakan organisasi digambarkan oleh budaya organisasi dengan menetapkan tujuan utama, prodesur kerja, bekerja sama antar anggota, serta tanggung jawab individu. Brown menyebutkan beberapa peran budaya organisasi, antara lain (Bemidele, 2022):

1. Mengurangi konflik. Budaya mendorong persepsi yang konsisten, definisi masalah, penilaian terhadap masalah dan pendapat, serta preferensi tindakan.
2. Koordinasi dan penegandalian. Budaya membantu proses koordinasi, kontrol organisasi, dan mendorong keseragaman pandangan.
3. Pengurangan ketidakpastian. Budaya dapat mengurangi kecemasan di dunia kerja, membuat keputusan menjadi lebih sederhana.
4. Motivasi. Budaya yang terpadu dapat meningkatkan nilai-nilai dan kepercayaan diri karyawan akan identifikasi dan loyalitas.
5. Keunggulan yang kompetitif. Budaya yang kuat akan meningkatkan peluang kesuksesan suatu organisasi .
6. **Karakteristik Budaya Organisasi**

 Robbins (dalam Azizah, 2018) menerangkan bahwa budaya organisasi memiliki tujuh karakteristik, antara lain:

1. Inovasi serta kemauan untuk mengambil resiko. Para pegawai didorong untuk menjadi inovatif serta berani dalam mengambil resiko.
2. Perhatian atau fokus terhadap suatu hal yang detail. Pegawai harus menunjukkan ketelitian, perhatian terhadap detail, serta

keterampilan analisis.

1. Orientasi atau fokus pada manfaat. Hasil atau manfaat lebih ditekankan oleh manajemen dibandingkan hanya teknik dan langkah-langkah atau proses yang dalam mencapai tujuan tersebut.
2. Orientasi individu atau orang. Manajemen memperhitungkan bagaimana keputusan akan memengaruhi orang-orang yang bekerja ketika membuat sebuah keputusan.
3. Orientasi pada kelompok atau tim. Kegiatan atau aktivitas kerja yang didasarkan pada tim bukan individu.
4. Agresivitas, biasanya individu lebih kompetitif serta agresif dibandingkan *easygoing* atau ramah.
5. Stabilitas. Organisasi lebih menekankan pada pemeliharaan *status quo* (menjaga keadaan saat ini seperti sebelumnya) sebagai lawan perkembangan.

### SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)

1. **Definisi SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)**

 Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 22 Tahun 2022, “SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyajian serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.” Menurut Dhiyavani (2017), SAP adalah landasan, aturan, atau prinsip umum dalam menyusun laporan keuangan dan untuk disajikan kepada pengguna, sedangkan prosedur akuntansi adalah metode atau cara khusus untuk menerapkan standar. Sari (2022) mendefiisikan SAP sebagai pedoman hukum yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan baik penerimaan maupun pengeluaran penggunaan anggaran pemerintah secara transparan, akuntabilitas, serta efisien agar menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas tinggi.

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka disimpulkan SAP merupakan prinsip serta landasan penyusunan serta penyajian laporan keuangan yang akuntabel, transparan, efisiensi, serta berkualitas tinggi (Dhiyavani, 2017; Kementerian Keuangan RI, 2022; Sari, 2022). Penyajian laporan keuangan sesuai SAP bertujuan untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan terhadap periode, anggaran, atau entitas, serta memenuhi kebutuhan bersama pengguna laporan dengan menetapkan standar tersebut sebagai pedoman struktur penyusunan atau penyajian serta persyaratan isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

 Penerapan SAP yang merujuk pada PP SAP Tahun (2022) terdiri dari 17 pernyataan standar, yaitu: (1) PSAP No. 01 terkait Penyajian Laporan Keuangan; (2) PSAP No. 02 terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas; (3) PSAP No. 03 terkait Laporan Arus Kas; (4) PSAP No. 04 terkait CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan); (5) PSAP No. 05 terkait Akuntansi Persediaan; (6) PSAP No. 06 terkait Akuntansi Investasi; (7) PSAP No. 07 terkait Akuntansi Aset Tetap ; (8) PSAP No. 08 terkait Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan; (9) PSAP No. 09 terkait Akuntansi; Kewajiban; (10) PSAP No. 10 terkait Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; (11) PSAP No. 11 terkait Laporan Keuangan Konsolidasi; (12) PSAP No.12 terkait Laporan Operasional; (13) PSAP No. 13 terkait Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; (14) PSAP No. 14 terkait Akuntansi Aset Tak Berwujud; (15) PSAP No. 15 terkait Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan; (16) PSAP No.16 terkait Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi; (17) PSAP No. 17 terkait Investasi.

1. **Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan**

 Udiyanti (dalam Nailurrohmah, 2021) menyebutkan indikator penerapan SAP yaitu:

1. Pengakuan

 Berdasarkan PP SAP Tahun 2022, pengakuan merupakan proses memenuhi persyaratan pencatatan peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga dapat membentuk komponen liablilitas, aset, ekuitas dana, pengeluaran atau belanja, pendapatan, serta pembiayaan pada laporan keuangan entitas pelapor. Jumlah uang yang dicatat dalam pos-pos laporan keuangan dipengaruhi oleh peristiwa atau kejadian yang berfungsi sebagai pengakuan.

1. Pengukuran

 Pengukuran merupakan proses memberikan nilai moneter/uang pada setiap pos laporan keuangan dan dapat diukur menggunakan nilai perolehan historis.

1. Pelaporan

 Melalui kinerja, posisi keuangan, serta arus kas suatu entitas mengenai alokasi sumber daya yang digunakan entitas dalam bisnisnya, pelpaoran dapat membantu sejumlah pengguna untuk mengevaluasi atau menilai sebuah tindakan serta keputusan.

1. Pengungkapan

 Pengungkapan memberikan penjelasan tentang isu normatif yang dianggap signifikan serta berguna selain apa yang dicantumkan pada laporan keuangan serta menentukan bagaimana elemen atau pos dilaporkan sehingga cukup normatif.

### Teknologi Informasi

1. **Definisi Teknologi Informasi**

 Menurut Haaq dan Keen yang dikutip oleh Lubis & Safii (2018:8) mengungkapkan pendapatnya mengenai teknologi informasi sebagai kumpulan alat yang mendukung pekerjaan manusia dalam melaksanakan tugas-tugas pemrosesan informasi. Martin (dalam Dalle dkk., 2020:1) berpendapat mengenai teknologi informasi mencaup lebih dari sekedar perlengkapan komputer dan perangkat keras ataupun lunak yang berguna sebagai alat menyimpan dan memroses, menyimpan, tetapi juga berguna untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi.

 Definisi teknologi informasi menurut Williams dan Sawyer (dalam Karim dkk., 2020:3) yaitu teknologi informasi sebagai kombinasi dari audio, video, dan transmisi data berbasis komputer. Sementara Sen (dalam Banjarnahor dkk., 2023) menyatakan bahwa teknologi informasi digunakan untuk membuat, menyimpan, dan menyebarluaskan data informasi pada berbagai objek dan fungsi.

 Berdasarkan penjelasan yang diuraikan, maka disimpulkan teknologi informasi ialah alat yang menunjang manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan pemrosesan informasi baik dalam hal menyimpan, mengolah, atau mengirimkan sebuah informasi. Dalam menyelesaikan pekerjaan seperti pemrosesan informasi, dibutuhkan jaringan komputer, jaringan internet, dan penggunaan sistem yang baik (Banjarnahor dkk., 2023; Dalle dkk., 2020; Karim dkk., 2020; M. Sari dkk., 2017).

 Sutarman (dalam Powa dkk., 2021) menjelaskan tujuan teknologi informasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memecahkan masalah, serta mengembangkan kretivitas. Teknologi informasi memiliki 6 (enam) fungsi, yaitu menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, serta transmisi.

1. ***Electronic Governmnet***

 Karim dkk. (2020:15) menjelaskan penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan disebut e-government. Penggunaan teknologi komputer sudah digunakan di setiap kantor pemerintahan mulai dari menangani data administrasi hingga pelayanan masyarakat, dan tugas-tugas lainnya. Penerapan *e-government* telah terbukti mendorong keterlibatan hubungan timbal balik digital antara masyarakat dan pemerintah. Hubungan baru seperti *Government to Business* (G2B), *Government to Citizen* (G2C), serta *Government to Government* (G2G) muncul sebagai hasil dari adopsi teknolog informasi.

 Penerapan teknologi informasi pemerintahan membutuhkan rencana, prosedur, waktu, dan biaya. Berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) No 3 Tahun (2003) terkait Pengembangan *E-Government*, terdapat enam (6) strategi, yaitu:

1. Membangun sistem pelayanan yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, serta dijangkau masyarakat luas.
2. Mengintegrasikan proses kerja dengan sistem pengelolaan pemerintah serta daerah otonom.
3. Memaksimalkan penggunaan dalam memanfaatan teknologi informasi.
4. Memperluas peran dunia usaha serta sektor teknologi informasi dam telekomunikasi.
5. Meningatkan kualitas SDM dengan meningkatka*n* literasimasyarakat baik di tingkat pemerintah maupun pemerintah daerah otonom.
6. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan yang realis dan terukur.

### Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

1. **Definisi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

 Azizah (2018) mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari tugas atau aktivitas pekerja yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu oleh individu maupun kelompok sebuah organisasi. Menurut Soleh & Suripto (2021:3), kinerja merupakan sejauh mana sebuah kebijakan atau program berhasil merealisasikan misi, sasaran , serta visi sebuah organisasi sebagaimana dituangkan melalui perencanaan strategis.

 Atamji (2021:24) menyatakan bahwa kinerja instansi pemerintah dapat diartikan sejauh mana visi, misi, dan strategi yang telah terwujud sebagai gambaran tingkat pencapaian tujaun ataupun sasarannya. Sedangkan Agusti (dalam Haura dkk., 2019) mendefinisikan kinerja aparat pemerintahan sebagai keberhasilan pejabat pemerintah yang ditentukan oleh kemampuannya dalam memenuhi target yang dianggarkan. Tujuan dari sistem tersebut yaitu untuk membantu pengawas atau atasan menilai keberhasilan renana dengan menggunakan intrumen pengukuran finansial dan non finansial.

 Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, maka disimpulkan kinerja aparatur pemerintahan daerah ialah tingkat pencapaian dalam menegrjakan tugas sesuai standar serta kriteria dalam mencapai sasaran atau target yang telah dianggarkan. Kinerja dapat memengaruhi faktor-faktor seperti pekerjaan, karyawan, perilaku dan keluaran, serta tingkat absensi untuk menentukan tingkat kinerja karyawan saat ini (Atamji, 2021; Azizah, 2018; Haura dkk., 2019; Soleh & Suripto, 2021).

1. **Indikator Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah**

 Indikator kinerja menurut Sedarmayanti (dalam Ruspina, 2013) yang digunakan sebagai pengukuran, meliputi:

1. Masukan (*input*). Mencakup evaluasi kepribadian pekerja atau karyawan berdasarkan hasil (pencapaian) pekerjaannya. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengukur berdasarkan tingkat kepatuhan, kejujuran, disiplin, pengabdian, inisiatif, kreativitas, kesopanan, komitmen, adaptasi, kemauan untuk belajar, serta sifat-sifat lainnya.
2. Keluaran (*output*). Aktivitas yang dapat dicapai baik secara fisik maupun nonfisik.
3. Manfaat (*benefit*). Hal yang menggambarkan fungsi keluaran beroperasi ketika telah mencapai kinerja yang diinginkan.
4. Dampak (*impact*). Menggambarkan pencapaian program dan dampaknya terhadap mesyarakat. Pengukurannya dilakukan setelah kegiatan berakhir dengan jangka waktu tertentu.

## Penelitian Terdahulu

 Temuan-temuan penelitian terdahulu pada bab ini akan digunakan sebagai acuan untuk menjadi sumber referensi bagi penulis, diantaranya:

Studi oleh Erayanti dkk (2023) yang meneliti terkait keberpengaruhan variabel independen yaitu budaya organisasi, standar akuntansi pemerintah, serta gaya kepemimpinan dengan *good governance* yang menjadi variabel dependen. Studi ini melibatkan 342 desa Kabupaten Kampar dengan jumlah responden 132 orang. Analisis regresi berganda digunakan sebagai metode analisis dalam studi ini dengan memanfaatkan SPSS versi 25. Proses pengambilan sampel memakai *propotional random sampling.*Studi ini menghasilkan budaya organisasi, sistem akuntansi pemerintah, serta gaya kepemimpinan memengaruhi *good governance.*

Fanitra & Junaidi (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Komitmen Pelayanan dan Teknologi Informasi pada *Good Governance* di Jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menjelaskan tafsiran mengenai komitmen pelayanan dan teknologi informasi terhadap implementasi penerapan *good government governance* (GGG)berbeda-beda di antara pegawai dan penyelenggaraan publik. Metode yang digunakan adalah kuantitatif melalui kuesioner sebanyak 170 responden yang diperoleh dari 17 SKPD. Data yang digunakan yaitu data kualitatif. Alat statistik menggunakan model statistik *multivariat structural equation modelling* (SEM). Studi ini menyimpulkan teknologi informasi lebih berdampak dalam mendukung GGG, sehingga keberadaan teknologi informasi adalah hal penting untuk menciptakan *good governance.*

Penelitian lain dilakukan oleh Haura dkk., (2019) untuk melihat hubungan antara komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dengan kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan daerah, serta *good governance*. Hasil studi menunjukkan variabel SPIP serta pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh secara positif juga signifikan dengan *good governance.* Sedangkan variabel komitmen organisasi memiliki pengaruh secara signifikan dengan *good governance,* tetapi tidak dapat memoderasi kinerja aparatur daerah, SPIP, serta pengelolaan keuangan daerah dengan *good governance.* Studi ini bersumber dari data primer dan dikumpulkan melalui kuesioner. Menggunakan alat smartPLS (*Parsial Least Square*) dan analisis regresi linier berganda guna menguji atau mengetahui jipotesis. Pengambilan sampel menggunakan *stratified sampling* dengan populasi sebanyak 30 SKPK dan 82 responden yang terdiri dari Kepala SKPK dan Bidang, Sekretaris, dan Kasubag SKPK di masing-masing OPD.

Wibowo & Indeswari (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan SAP, kinerja aparatur pemerintah daerah, budaya organisasi, pengelolaan keuangan daerah, SPI, serta pengawasan DPRD terhadap *good governance.* Studi ini menyimpulkan penerapan SAP, kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan DPRD memiliki pengaruh positif dengan *good governance.* Sedangkan budaya organisasi dan SPI tidak memengaruhi *good governance.* Studi dilakukan dengan metode kuantitatif. Kuesioner digunakan sebagai sumber data primer. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan didapat 36 responden, serta dianalisis dengan model regresi linear menggunakan analisis SPSS 15.

Situmeang (2021) meneliti tentang Analisis Hubungan Budaya Organisasi dan Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja dalam Penerapan *Good Governance*. Di Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah, penerapan *good governance* telah mencapai hasil seperti yang diharapkan, namun masih ada banyak kendala dan hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh sebanyak 57 orang. Studi ini menghasilkan bahwa dengan motivasi kerja menjadi variabel intervening, timbul hubungan positif juga signifikan antara budaya organisasi dan kepemimpinan pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian oleh Susilo dkk. (2019) dilakukan untuk melihat pengaruh budaya organisasi, komitmen pegawai, dan gaya kepemimpinan pada *good governance*. Studi ini menjelaskan *good goverance* di Kabupaten Jombangbelum terlaksana secara maksimal karena pengelolaan lembaga yang belum memberikan layanan yang optimal, tidak transparansi dan tidak akuntabel. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan wawancara dan kuesioner sebagai data primer. Menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisinya dengan SPSS. Pemilihan sampel dengan metode random sampling yang berjumlah 115 orang. Penelitian menghasilkan bahwa baik budaya birokrasi, komitmen organisasi, maupun gaya kepemimpinan memengaruhi secara positif juga signifikan dengan *good governance*.

Penelitian oleh Sari dkk. (2023) yang meneliti terkait keberpengaruhan variabel independen yaitu kinerja aparatur daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan variabel dependennya yaitu penerapan *good governance* Studi ini menjelaskan bahwa kasus korupsi terjadi karena banyaknya pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang disebabkan oleh lemahnya implementasi *good governance.* Metode studi yang digunakan yaitu metode kuantitatif, di mana data didapat dari kuesioner yang merupakan data primer. Responden pada studi ini diperoleh 30 orang. Studi ini menyimpulkan bahwa kinerja aparatur daerah dan pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh secara positif juga signifikan dengan penerapan *good governance*.

Ikhbaluddin (2020) meneliti terkait startegi pemerintah dalam menerapkan teknologi informasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan. Studi ini mengungkapkan bahwa belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi di Kota Tasikmalaya mengakibatkan tata kelola pemerintahan yang baik terdampak. Metode kualitatif dilakukan pada studi ini. Proses pengumpulan datanya berupa dokumentasi, wawancara, serta triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan, serta verifikasi. Studi ini menyimpulkan bahwa hanya beberapa OPD yang menggunakan teknologi informasi pemerintahan sepertu sistem atau aplikasi layanan. Meskipun implementasinya belum optimal, namun dampaknya dapat dirasakan cukup baik di Kota Tasikmalaya.

Edinov dkk., (2022) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *good governance*, di mana pada studi ini, SDM menjadi variabel moderasi. Metode pada studi ini menggunakan metode kuantitatif. Data diambil melalui kuesioner yang disebarluaskan dengan *whatsapp* grup SAIBA SIMAKBMN KSDAE kepada 255 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus (*non probability sample*) sedangkan analisis datanya menggunakan program WarpPLS 7.0 melalui pengujian reabilitas dan statistik deskriptif. Studi ini menyimpulkan bahwa Penatausahaan Aset Tetap dan SPIP memiliki pengaruh positif juga signifikan dengan *good governance*. Sementara SDM hanya memoderasi hubungan antara Penatausahaan Aset Tetap dan SPIP terhadap *good governance*. Namun dalam studi ini, budaya organisasi, teknologi informasi, serta komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif dan variabel SDM tidak memoderasi *good governance*.

Lestariningrum dkk. (2020) menganalisis pengaruh kinerja aparatur, komitmen organisasi, serta pengelolaan keuangan daerah pada *good governance.* Studi ini menghasilkan kinerja aparatur, komitmen organisasi, serta pengelolaan keuangan daerah memengaruhi secara positif juga signifikan pada *good governance.* Jenis studi ini yaitu survey pada aparatur pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Data didapatkan dari pembagian kuesioner kepada kepala dinas, badan, sekretariat, kecamatan, serta staff bagian keuangan. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling.*

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama & Tahun** | **Judul** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Erayanti dkk., (2023) | *Good Governance* Pemerintah Desa: Apakah Dipengaruhi Budaya Organisasi, Standar Akuntansi Pemerintah, serta Gaya Kepemimpinan? | Kesimpulan dari penelitian menunjukkan baik SAP, budaya organisasi, maupun gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif juga signifikan dengan tata kelola pemerintahan. |
| 2 | Fanitra & Junaidi, (2020) | Pengaruh Teknologi Informasi dan Komitmen Pelayanan dengan *Good Governance* | Baik teknologi informasi maupun komitmen pelayanan memiliki pengaruh dengan implementasi prinsip-prinsip *good govenance* serta kinerja pegawai. |
| 3 | Haura dkk., (2019) | Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta Pengelolaan Keuangan Daerah dengan *Good Governance* | Dari hasil studi diperoleh SPIP serta pengelolaan keuangan daerah memengaruhi secara positif juga signifikan dengan *good governance.* Selain itu,kinerja aparatur daerah tidak memengaruhi secara signifikan terhadap *good governance.* Komitmen organisasi memiliki pengaruh secara signifikan tetapi tidak mampu memoderasi hubungan antara SPIP, pengelolaan keuangan daerah, kinerja aparatur daerah dengan *good governance.* |
| 4 | Wibowo & Indeswari, (2019) | *The Influence of Perfomance of Local Government, Organizational Culture, Implementation of Good Government Accounting Standards, Financial Management, The System of Internal Control, Parliamentary Supervision, and Implementation of Good Governance*  | Baik kinerja aparatur pemerintah daerah, SAP, pengelolaan keuangan daerah, maupun pengawasan DPRD memiliki pengaruh secara positif dengan penerapan tata kelola pemerintahan*.* Namun, ariabel independen yaitu budaya organisasi serta SPI tidak memiliki pengaruh dengan penerapan tata kelola pemerintahan. |
| **No** | **Nama & Tahun** | **Judul** | **Hasil Penelitian** |
| 5 | Situmeang, (2021) | Analisis Hubungan Budaya Organisasi dan Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja sebagai variabel intervening dalam Penerapan *Good Governance* | Budaya organisasi serta kepemimpinan melalui motivasi kerja pegawai memiliki hubungan positif juga signifikan dengan penerapan *good governnace*  |
| 6 | Susilo dkk., (2019) | *The Effect of Culture, Employee Commitment, and Leadership Style on Good Governance Performance of Jombang District Government (Indonesia)* | Budaya birokrasi, komitmen organisasi, serta gaya kepemimpinan memengaruhi secara positif juga signifikan dengan *good governance.* |
| 7 | R. P. Sari dkk., (2023) | Pengaruh Kinerja Aparatur Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah dengan Penerapan *Good Governance*  | Baik kinerja aparatur daerah maupun pengelolaan keuangan daerah memengaruhi secara positif juga signifikan dengan penerapan *good governance.* |
| 8 | Ikhbaluddin, (2020) | Strategi Pemerintah dalam Menerapkan Teknologi Informasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Kota Tasikmalaya | Hanya sedikit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menerapkan teknologi informasi pemerintah dan penggunaannya pada sistem atau aplikasi layanna masih terbatas. |
| 9 | Edinov dkk., (2022) | Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Good Governance* dengan Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi | SPIP serta PAT memengaruhi secara positif juga signifikan dengan *good governance.* SDM sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan SPIP dan PAT dengan *good governance.*Budaya organisasi teknologi informasi, serta komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif dan SDM tidak memoderasi dengan *good governance*. |
| 10 | Lestarining- rum dkk. (2020) | Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur, Komitmen Organisasi, serta Pengelolaan  | Variabel kinerja aparatur, komitmen organisasi, serta pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif juga  |
| **No** | **Nama & Tahun** | **Judul** | **Hasil Penelitian** |
|  |  | Keuangan Daerah terhadap *Good Governance* | signifikan terhadap *good governance.* |

Sumber: data yang diolah

## Kerangka Pemikiran Konseptual

Definisi kerangka berpikir menurut Sugiyono (2019:95) ialah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan sejumlah persoalan yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Kerangka konseptual bertujuan memberikan pembenaran teoretis atas korelasi antar variabel yang diteliti.

1. **Pengaruh Budaya Organisasi dan *Good Governance***

 Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi *good governance,* karena dapat membentuk karakteristik pada individu atau kelompok dalam sebuah instansi (Erayanti dkk., 2023). Hal tersebut tercermin dari pengetahuan pegawai mengenai visi, misi, dan strategi organisasi di lingkungan masing-masing, serta bagaimana para pegawai berperilaku dengan menghargai dan menghormati pegawai lainnya (Susilo dkk., 2019). Pegawai dengan karakteristik baik tidak akan melakukan penyelewengan atau melanggar hukum sehingga akan menguntungkan bagi instansi dan memudahkan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, serta prinsip *good governance* lainnya (Situmeang, 2021; Syafrion, 2015).

 Berkaitan dengan *stewardship theory*, *steward* merasa bahwa mempunyai kepentingan bersama dan bertindak seperti pemilik disertai pertimbangan rasional karena *steward* memandang upaya demi mencapai tujuan organisasi. Namun untuk mencapainya, budaya yang positif serta kuat yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi harus dimiliki para pegawai. Adanya budaya kolektif dapat menghasilkan tindakan positif terhadap keharmonisan kelompok. Hubungan tersebut dapat terjadi jika principal dan manajer menempatkan nilai kesejajaran di suatu organisasi (Mailoor dkk., 2017; Raharjo, 2007). Menurut Widyasanti & Misra (2023), budaya organisasi memliki pengaruh positif terhadap *good governance* karena semakin kuatnya budaya organisasi yang dimiliki pegawai/aparatur akan memengaruhi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik*.*

1. **Pengaruh SAP dan *Good Governance***

 Penyusunan laporan keuangan harus disusun mengikuti SAP sesuai PP SAP Tahun 2022, sehingga memungkinkan pemerintah menyajikan informasi yang dapat dimanfaatkan ketika mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut dilakukan merupakan cara dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (Dhiyavani, 2017)*.* Dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan di bidang publik. Peningkatan fokus tersebut memiliki konsekuensi, terutama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk laporan finansial. Oleh karena itu, tingkat akuntabilitas dan transparansi sangat memengaruhi masyarakat, sehingga peran manajer akan menjadi penting agar tingkat akuntabilitas dan transparansi masyarakat berhasil(Alfarisi dkk., 2020; Hasana & Hamdani, 2023; Indriasih & Sulistyowati, 2022).

 Berdasarkan *stewardship theory,* dijelaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah sebagai entitas terpercaya yang bertindak demi kepentingan publik dengan menyediakan laporan keuangan yang transparan akan memungkinkan tercapainya tujuan dalm bidang perkonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memegang prinsip *good governance* (Mailoor dkk., 2017)*.* Menurut Wibowo & Indeswari (2019), SAP memiliki pengaruh terhadap *good governance,* karena SAP dikatakan baik jika laporan keuangan diinformasikan secara konsisten dan berkala sehingga penerapan *good governance* dapat tercapai.

1. **Pengaruh Teknologi Informasi dan *Good Governance***

 Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan *good governance* (Silitonga, 2021). Teknologi informasi dapat mempercepat proses pelaporan keuangan, membuat laporan keuangan yang akurat, menyimpan data dalam jumlah besar, dan mempublikasikan dengan menggunakan jaringan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah (Sari, 2022). Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi membantu penyelenggaraan *good government governance* dalam aspek efektivitas dan efisiensi, transparansi, maupun akuntabilitas (Ikhbaluddin, 2020).

 *E-government* dalam lingkungan pemerintahan mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, menangani keluhan masyarakat, serta menjamin bahwa semua warga negara menerima layanan yang berkualitas seperti yang diharapkan (Nadila & Septiani, 2021). Menurut penelitian Fanitra & Junaidi (2020), prinsip-prinsip *good governance* akan semakin efektif jika kualitas teknologi juga semakin tinggi.

1. **Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Memoderasi Pengaruh Budaya Organisasi dan *Good Governance***

 Terbentuknya karakteristik pemerintah yang baik didukung oleh kinerja aparatur pemerintah daerah yang baik, adaptif, serta responsif sehingga dapat mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan*.* Hal tersebut diwujudkan dengan membangun SDM yang berkualitas agar menjadi lebih produktif dan berkinerja tinggi sebagai pelaku *good governance* (Sari dkk., 2023).

 Budaya organisasi yang kuat akan memacu pegawai untuk dapat berpikir, bertindak sesuai kaidah atau nilai-nilai organisasi (Indriasih dkk., 2022). Perubahan budaya organisasi sebagian besar bergantung pada komitmen pimpinan, pelaksanaan yang transparan, serta kinerja pegawai yang diukur dari seberapa besar para pegawai dapat mengikuti peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis (Situmeang, 2021; Tomo, 2019:31). Maka dari itu, kinerja perlu diperhatikan di setiap instansi manapun, karena kinerja memengaruhi keberhasilan instansi dalam mencapai tujuannya dalam mewujudkan *good governance* (Indriasih dkk., 2024). Didukung oleh penelitian Azzindani & Irwan (2020) dan Lestariningrum dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pemerintah akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai *good government governance* jikakinerja aparatur pemerintah daerah lebih baik.

1. **Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Memoderasi SAP dan *Good Governance***

 Penerapan SAP didukung oleh kinerja aparatur pemerintah yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan informasi yang objektif, sehingga akan memengaruhi penerapan *good governance.* Implementasi SAP harus disusun seuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah SAP Tahun 2022 agar tercipta kualitas laporan keuangan yang transaparan dan akuntabel yang merupakan unsur *good governance*. Sehingga pihak yang berkepentingan mampu menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai alat dalam mengambil keputusan (Dhiyavani, 2017; Modo dkk., 2016).

 Penelitian Zeyn (2011) menunjukkan bahwa pemahaman SAP sangat penting dalam menyusun laporan keuangan karena dapat meningkatkan transparansi atau keterbukaan serta akuntabilitas, yang merupakan prinsip *good* governance. Hal tersebut memungkinkan publik untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dan memastikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas tinggi adalah pemahaman dan penerapan SAP.

1. **Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Memoderasi Pengaruh Teknologi Informasi dan *Good Governance***

 Kinerja aparatur pemerintah dipandang sebagai salah satu pendorong utama dibalik pertumbuhan atau peningkatam teknologi informasi atau *e-government.* Manajemen dapat menggunakan informasi setiap saat dalam pengambilan keputusan jika data yang disajikan akurat dan strategis, yang dihasilkan dari ketersediaan teknologi informasi yang tepat waktu (Sari dkk., 2017). Hal tersebut harus didukung dengan kinerja aparatur yang kompeten guna menerapkan prinsip *good governance.* Untuk memperlancar akses terhadap berbagai informasi dan layanan publik, instansi pemerintah bekerja sama untuk menciptakan jaringan sistem manajemen dan prosedur yang dapat memaksimalkan kemajuan teknologi informasi (Nadila & Septiani, 2021)*.*

PenelitianFanitra & Junaidi (2020)menyatakan bahwa ketika kinerja pegawai dinilai baik, maka akan memengaruhi penggunaan teknologi informasi terhadap *good governance*, sedangkan kinerja yang menurun akan mengurangi dampaknya. Ketersediaan teknologi informasi seperti komputer dapat meringankan tugas yang dibebankan kepada karyawan. Teknologi informasi memberikan kemudahan pekerjaan adminidtratif dan banyak manfaat di tempat kerja bagi komunikasi dan koordinasi lingkungan kerja.

Budaya Organisasi (X1)

*Good Governance* (Z)

Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)

Teknologi Informasi

(X3)

Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah (Z)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

## Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99-100), hipotesis adalah tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah diuraikan, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| H1 : | Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap *Good Governance* |
| H2 : | Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap *Good Governance* |
| H3 : | Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap *Good Governance* |
| H4 : | Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah memperkuat hubungan pengaruh Budaya Organisasi terhadap *Good Governance* |
| H5 : | Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah memperkuat hubungan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap *Good Governance*  |
| H6 : | Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah memperkuat hubungan pengaruh Teknologi Informasi terhadap *Good Governance*  |

# METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian

 Pendekatan kuantitatif digunakan dalam studi ini berdasarkan pada filsafat positivisme yang bertujuan mengkaji populasi atau sampel, menghimpun data melalui penggunaan instrumen pengukuran, serta menguji hipotesis yang sudah ditentukan. Hubungan sebab akibat antara gejala dan kenyataan dapat dikategorikan, konkrit, dapat diamati, dan terukur menurut filsavat positivisme (Sugiyono, 2019:16). Sumber data studi ini yaitu data primer berupa kuesioner yang dilakukan pada OPD di Kota Tegal.

## Populasi dan Sampel

1. **Populasi**

 Definisi populasi menurut Sugiyono (2019:129) ialah suatu wilayah umum yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dengan jumlah serta kriteria tertentu untuk diambil kesimpulan. Populasi pada studi ini berjumlah 36 OPD yang ada di Kota Tegal, diantaranya:

Tabel 3.1
Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Nama OPD** |
| 1 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | Inspektorat |
| 3 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah |
| 4 | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah |
| 5 | Badan Keuangan Daerah |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak |
| **No** | **Nama OPD** |
| 8 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 9 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 10 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 12 | Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan |
| 13 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 15 | Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan |
| 16 | Dinas Perhubungan |
| 17 | Dinas Sosial |
| 18 | Dinas Kepemudaan, dan Olahraga, dan Pariwisata |
| 19 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 20 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 21 | Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan |
| 22 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 23 | Badan Kesbangpol |
| 24 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| 25 | Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda |
| 26 | Bagian Hukum Setda |
| 27 | Bagian Organisasi Setda |
| 28 | Bagian Umum Setda |
| 29 | Bagian Perekonomian Setda |
| 30 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda |
| 31 | Bagian Pembangunan Setda |
| 32 | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda |
| 33 | Kecamatan Tegal Timur |
| 34 | Kecamatan Tegal Barat |
| 35 | Kecamatan Tegal Selatan |
| 36 | Kecamatan Margadana |

 Sumber: diolah penulis

1. **Sampel**

 Bagian dari ciri-ciri atau kriteria dan jumlah populasi disebut dengan sampel. Proses pengambilan sampel pada studi ini dengan sampling jenuh. Sugiyono (2015:85) menyatakan bahwa sampling jenuh didefinisikan sebagai suatu metode penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Responden pada studi ini yaitu pegawai yang memahami peran administrasi keuangan atau akuntansi serta memahami tata kelola pemeirntahan yang baik (*good governance*) di masing-masing dinas pada OPD dengan jabatan Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara. Jumlah masing-masing OPD terdapat 2 responden, sehingga keseluruhan jumlah sampel penelitian ini adalah 36 × 2 = 72 responden.

## Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel

 Variabel penelitian mencakup informasi yang akan dikembangkan menjadi sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2015:38). Pada studi ini, variabel dependen yaitu good governance, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu Budaya Organisasi, Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Teknologi Informasi. Adapun Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah pada studi ini sebagai variabel moderasi.

1. *Good Governance* (Variabel Dependen/Y)

 *Good governance* yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dalam kegiatan ekonomi, politik, administratif, serta pemanfaatan sumber daya dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas. Menciptakan kerangka hukum dan politik untuk aktivitas usaha, serta manejemen pembangunan yang kompeten dan akuntabel merupakan komponen lain dari *good governance* (Erayanti dkk., 2023; Suhardiman dkk., 2023; Tomo, 2019; Zeyn, 2011). *Good governance* memiliki lima (5) indikator, yaitu transparansi, akuntabilitas, aturan hukum, daya tanggap (*responsiveness*), dan berkeadilan.

1. Variabel Bebas atau *Independen Variable (X)*
2. Budaya Organisasi ($X\_{1}$)

 Budaya organisasi dipandang sebagai suatu perspektif berdasarkan

norma, keyakinan, serta nilai kolrktif yang dapat memengaruhi perilaku karyawan, bagaimana cara menggambarkan pekerjaan dan bekerja dengan rekan kerja lainnya (Azizah, 2018; Bemidele, 2022; Maria dkk., 2022; Rivai & Mulyadi, 2012; Sawlani dkk., 2021). Menurut Robbins (dalam Azizah, 2018), karakteristik budaya organisasi yaitu inovasi dan pengambilan risiko, perhatian pada detail, orientasi terhadap individu, orientasi terhadap hasil, orientasi bersama atau tim.

1. SAP/Standar Akuntansi Pemerintahan ($X\_{2}$)

 SAP yaitu prinsip serta landasan menyusun serta menyajikan laporan keuangan secara transparan, akuntabel, efisiensi, dan berkualitas tinggi (Dhiyavani, 2017; Kementerian Keuangan RI, 2022; Sari, 2022). Indikator SAP adalah pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan (Susanti & Andayani, 2017).

1. Teknologi Informasi ($X\_{3}$)

 Teknologi informasi ialah alat yang menunjang manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan pemrosesan informasi baik dalam hal menyimpan, mengolah, atau mengirimkan sebuah informasi. Dalam menyelesaikan pekerjaan seperti pemrosesan informasi, dibutuhkan jaringan komputer, jaringan internet, dan penggunaan sistem yang baik (Banjarnahor dkk., 2023; Dalle dkk., 2020; Karim dkk., 2020; M. Sari dkk., 2017).

1. Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah *(*Variabel Moderasiatau *Z)*

 Kinerja aparatur pemerintahan daerah adalah tingkat pencapaian dalam menegrjakan tugas sesuai standar serta kriteria dalam mencapai sasaran atau target yang telah dianggarkan. Kinerja dapat memengaruhi faktor-faktor seperti pekerjaan, karyawan, perilaku dan keluaran, serta tingkat absensi untuk menentukan tingkat kinerja karyawan saat ini (Atamji, 2021; Azizah, 2018; Haura dkk., 2019; Soleh & Suripto, 2021).

 Sedarmayanti (dalam Ruspina, 2013) menyebutkan dimensi kinerja aparatur pemerintahan daerah yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat), dan *impact* (dampak).

Tabel 3.2
Operasional Variabel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** |
| 1 | *Good governance* (Y)**Sumber:**Fitria Erayanti, Yesi M.B, & Nur A (2023) | Transparansi | 1. Informasi yang memadai
 | Interval |
| 1. Kemudahan akses informasi
 |
| Akuntabilitas | 1. Laporan pertanggungjawaban publik
 |
| 1. Standar prosedur pelaksanaan
 |
| Daya Tanggap | 1. Kemampuan menanggapi keluhan masyarakat
 |
| 1. Daya tanggap menciptakan *good governance*
 |
| Berkeadilan | 1. Pelayanan adil
 |
| 1. Komitmen pelayanan
 |
| Aturan Hukum | 1. Peraturan perundang-undangan
 |
| 1. Penindakan hukum
 |
| 2 | Budaya Organisasi (X1)**Sumber:** Robbins dan  | Inovasi dan pengambilan risiko | 1. Kebebasan berinovasi
 | Interval |
| 1. Berani mengambil risiko
 |
| Perhatian terhadap detail | 1. Detail terhadap pekerjaan
 |
| 1. Ketelitian
 |
| Orientasi pada  | 1. Pemberdayaan individu
 |
| **No** | **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** |
|  | Judge (2013) (dalam Tewal dkk., 2017) | individu | 1. Aktif mengambil kesempatan
 |  |
| Orientasi pada hasil | 1. Penghargaan (reward) atas kinerja unggul
 |  |
| 1. Hasil yang dicapai
 |  |
| Orientasi bersama | 1. Kerja sama dan komunikasi antar tim
 |  |
| 1. Perhatian kepada tim
 |  |
| 3 | SAP (X2)**Sumber:**Susanti & Andayani, (2017) | Pengakuan | 1. Pencatatan disertai bukti
 | Interval |
| 1. Pengakuan aset, liabilitas, dan pendapatan
 |
| Pengukuran | 1. Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan
 |
| 1. Relevansi
 |
| Pengungkapan | 1. Transparan dan jelas
 |  |
| 1. Anggaran penerimaan
 |
| Pelaporan | 1. Pelaporan tepat waktu
 |
| 1. Penyajian laporan keuangan
 |
| 4 | Teknologi Informasi (X3)**Sumber:**Mutia Sari, Hasan B, Mirna I (2017) | Jaringan komputer | 1. Jumlah komputer yang memadai
 | Interval |
| 1. Komputer digunakan dalam proses akuntansi
 |
| Jaringan internet | 1. Kecepatan koneksi
 |
| 1. Internet stabil
 |
| Penggunaan sistem | 1. Penyusunan laporan dengan software
 |
| 1. Keamanan *cyber* dan perlindungan data
 |
| 1. *E-Government Services*
 |
| 1. Pemantauan kinerja sistem
 |
| 5 | Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah (Z)**Sumber:**Sedarmayanti (2004) dalam Ruspina (2013) | *Input* (Masukan) | 1. Disiplin
 | Interval |
| 1. Otoritas dan tanggung jawab
 |
|  *Output* (keluaran) | 1. Laporan analisis keuangan
 |
| 1. Kerja sama antar tim
 |
| *Outcome* (hasil) | 1. Tingkat pencapaian program
 |
| 1. Inisiatif
 |
| *Benefit* (manfaat) | 1. Kebijakan dan program berdampak positif
 |
| Impact (dampak) | 1. Dampak dari hasil kegiatan pada kehidupan masyarakat
 |

Sumber: Data diolah, 2024

## Metode Pengumpulan Data

 Data primer dimanfaatkan sebagai sumber data dan proses pengumpulan data berbentuk kuesioner. Kuesioner menurut Sugiyono (2019:199) ialah metode pengumpulan data dengan meminta responden untuk menjawab sejumlah pernyataan atau pertanyaan tertulis. Kuesioner akan dibagikan secara langsung kepada pegawai yang ada di OPD Kota Tegal terutama yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Bendahara.

## Instrumen Penelitian

 Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2019:156) yaitu alat ukur fenomena sosial dan alam yang dapat diamati. Tujuan pengujian validitas dan realibilitasuntuk mengukur variabel yang sudah banyak tersedia. Pengumpulan informasi berupa kuesioner atau angket dengan skala interval, dimana skor atau nilai dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Interval

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Simbol** | **Jawaban Angket Penelitian** | **Nilai** |
| SS | Sangat Setuju | 5 |
| S | Setuju | 4 |
| KS | Kurang Setuju | 3 |
| TS | Tidak Setuju | 2 |
| STS | Sangat Tidak Setuju | 1 |

## Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

1. **Analisis Statistik Deskriptif**

 Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2015:147) bertujuan mengkaji data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan. Nilai mean, varian, standar deviasi, jumlah, range, maksimum, minimum, kurtosis, dan *skewness* (distribusi kemiringan) termasuk dalam statitik deskriptif. Analisis digunakan untuk memberikan deskripsi variabel budaya organisasi, SAP, teknologi informasi, dan kinerja aparatur pemerintahan daerah.

1. **Uji Kualitas Data**
2. Uji Validitas

 Pengujian ini menentukan valid atau tidak sebuah kuesioner. Apabila jawaban atas pernyataan dapat mendeskripsikan pokok bahasan, maka kuesioner tersebut dianggap valid. Validitas didefinisikan sebagai keakuratan hasil penelitian yang mewakili kebenaran meskipun menggunakan subjek responden yang berbeda (Syafina & Harahap, 2019:57).

 Ghozali (dalam Syafina & Harahap, 2019:57) mengatakan bahwa validitas diuji dengan melihat besarnya korelasi antar variabel, di mana koefisien korelasi dilambangkan dengan r dan signifikansi antara r diuji. Syarat validitasnya yaitu r hitung ≥ r tabel. Untuk menguji signifikansinya, nilai r hitung dengan r tabel dibandingkan untuk *degree of freedom* (df)= n-2, di mana n sebagai jumlah sampel.

1. Uji Reabilitas

 Kuesioner yang berfungsi sebagai indikator variabel atau konstruk dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas. Jika pernyataan dalam kuesioner djawab dengan konsisten, maka pernyataan tersebut dianggap reliabel (andal). Pengujian reliablitas hanya dapat digunakan untuk menguji pernyataan yang telah valid atau sah. Setelah pengukuran dilakukan dengan menggunakan SPSS, teknik statistik yang digunakan selanjutnya yaitu *koefisien cronbach’s alpha,* di mana sebuah kuesioner dikatakan reliable bila *Cronbach’s Alpha* > 0,70 (Ghozali dalam Syafina & Harahap, 2019).

1. **Uji Asumsi Klasik**

 Pengujian asumsi yang digunakan ialah uji normalitas, uji multikonieritas, dan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah ada permasalahan asumsi klasik pada sebuah model regresi linear OLS (*Ordinary Least Square*).

1. Uji Normalitas

 Tujuan pengujian ini yaitu untuk mengetahui apakah residu, model regresi disebut sebagai variabel pengganggu berdistribusi normal, di mana model regresi yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal dianggap baik. Pada studi ini, uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non-parametik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan α = 0,05. Apabila nilai sig. atau probabilitas > α, maka distribusinya normal dan apabila nilai sig. atau probabilitas < α, maka data tidak berdistribusi normal.

1. Uji Multikolinieritas

 Multikolinier menurut Fish ialah adanya keterkaitan linear sempurna lebih dari satu. Jika terjadi multikolinier sempurna (koefisien korelasi antar variabel bernilai 1), maka koefisien regresi dan variabel independen tidak dapat diprediksi juga standar error-nya tak terbatas (Suharyadi & Purwanto, 2018). VIF(*Variance Inflation Factor*) beserta nilai tolerance digunakan untuk melakukan uji multikolinier, di mana apabila multikolinearitas tidak terjadi, maka nilai tolerance menunjukkan lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10. Sebaliknya, multikolinearitas terjadi ketika nilai tolerance menunjukkan lebih kecil dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10.

1. Uji Heteroskedastisitas

 Ghozali (dalam Syafina & Harahap, 2019:69) menyatakan tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan terjadi perbedaan carian residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Tidak terjadinya heteroskedastisita dianggap model regresi yang baik. Pendeteksian heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*, yaitu dengan membandingkan signifikan jika hasilnya sig > 0,05 atau 5%. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas jika signifikan di atas 5%.

1. **Uji Hipotesis**

 Pengujian ini dilakukan guna menguji secara statistik suatu pernyataan serta menentukan diterima atau ditolaknya suatu pernyataan.

1. Uji Interaksi atau MRA(*Moderated Regression Analysis*)

 Uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) menurut Liana, (2009) yaitu analisis regresi linear berganda yang mengandung unsur interaksi (diketahui perkalian dua variabel bebas atau lebih) dengan persamaan rumus sebagai berikut:

|  |
| --- |
| Y = α + $β\_{1}X\_{1}$+ $β\_{2}X\_{2}$+ $β\_{3}X\_{3}$+ $β\_{4}(X\_{1}\*Z)$ + $β\_{5}(X\_{2}\*Z)$ + $β\_{6}(X\_{3}\*Z)$ + ɛ |

Keterangan:

Y = *Good Governance*

α = Konstanta

$β$ = Koefisien regresi setiap variabel

$X\_{1}$ = Budaya Organisasi

$X\_{2}$ = Standar Akuntansi Pemerintahan

$X\_{3}$ = Teknologi Informasi

$X\_{1}$\*Z = Interaksi antara budaya organisasi dengan kinerja aparatur pemerintahan daerah

$X\_{2}$\*Z = Interaksi antara standar akuntansi pemerintahan dengan kinerja aparatur pemerintahan daerah

$X\_{2}$\*Z = Interaksi antara teknologi informasi dengan kinerja aparatur pemerintahan daerah

ɛ = error penelitian

1. Uji F (Uji Kelayakan)

 Uji ini bertujuan menunjukkan seberapa baik variabel bebas ($X\_{1}$, $X\_{2}$,...$ X\_{k}$) dapat menjelaskan perilaku serta keragaman variabel terikat (Y). Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas mempunyai koefisien regresi sama dengan nol.

 Jika nilai koefisien $b\_{1}$ serta $b\_{2}$ tidak sama dengan nol, maka variabel bebas $X\_{1}$ dan $X\_{2}$ dianggap dapat memengaruhi Y. Jika sama dengan nol, maka dianggap tidak dapat memengaruhi variabel Y. Untuk menentukan nilaiilai F-hitung, maka dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut.

$$F=\frac{R^{2}/(k-1)}{(1-R^{2})/(n-3)}$$

 Dengan membandingkan nilai signifikansi F dengan taraf pengujian (5%), maka dapat diketahui apakah $H\_{0}$ diterima atau ditolak (Suharyadi & Purwanto, 2018:241-244).

1. Model regresi dikatakan layak untuk dilanjutkan dalam penelitian bila F-hitung > F-tabel serta nilai sig. F < taraf pengujian (5% atau 0,05).
2. Model regresi dikatakan tidak layak untuk dilanjutkan dalam penelitian bila F-hitung < F-tabel serta nilai sig. F > taraf pengujian (5% atau 0,05).
3. Uji t (Uji Parsial)

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar suatu variabel bebas secara individu atau parsial dapat menjelaskan variasi variabel terikat (Syafina & Harahap, 2019:78). Berikut langkah-langkah untuk mengambil keputusan uji t, diketahui α= 0,05.

1. Secara parsial, variabel bebas memengaruhi secara signifikan dengan variabel terikat, apabila nilai t hitung > t tabel serta nilai Sig. t < α.
2. Secara parsial, variabel bebas tidak memengaruhi secara signifikan dengan variabel terikat, apabila nilai t hitung < t tabel dan nilai Sig. t > α.
3. Koefisien Determinasi (*Adjusted* R²)

 Uji ini berguna menilai seberapa besar keakuratan interaksi antar variabel bebas dan terikat. Nilai R² yang semakin besar nilainya menunjukkan seberapa variabel X dapat menjelaskan Y. Diketahui nilai R² yaitu berkisar 0 sampai 1. Di mana nilai R² = 1 menyatakan varian persamaan regresi atau variabel bebas, baik $X\_{1}$ maupun $X\_{2}$, dapat menjelaskan total variasi sebesar 100% dari variabel Y. Sedangkan Nilai R² = 0 menunjukkan persamaan regresi yang dapat menjelaskan tidak ada total varians yang dijelaskan dari variabel Y.

 Koefisien determinasi > 0,5 menyatakan variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat, begitupun dengan R²; = 0,5 dianggap sedang; serta < 0,5 relatif kurang baik. Ada alasan mengapa koefisien determinasi < 0,5, karena spesifikasi model yang tidak tepat, misalnya pemilihan atau pengukuran variabel yang tidak tepat (Suharyadi & Purwanto, 2018:233).